

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN



Pada umumnya setiap perusahaan maupun instansi pemerintahan termasuk juga Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir berusaha mencapai tujuannya dengan semaksimal mungkin secara lebih efektif dan efisien. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pihak manajemen harus menjalankan usaha maksimal dan mempunyai kemampuan yang baik dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan operasional. Dalam pengawasan kegiatan operasional suatu instansi, manajemen memerlukan pemeriksaan mengenai kegiatan operasionalnya untuk menilai efektivitas dan efisiensi yang disebut sebagai audit operasional.

Dalam pengawasan kegiatan operasional pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir, memerlukan audit operasional. Pada dasarnya audit operasional bertujuan menilai efisiensi dan efektivitas suatu objek pemeriksaan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Efektivitas mengacu pada pencapaian suatu tujuan dan harus ada kriteria tertentu mengenai apa yang dimaksud efektivitas. Efisiensi lebih mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti halnya efektivitas, efisiensi juga harus memiliki kriteria tertentu mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan secara lebih efisien, sebelum audit operasional dapat bermakna. Seringkali lebih mudah menentukan kriteria efisiensi daripada

efektivitas jika efisiensi dimaksudkan sebagai pengurangan biaya tanpa mengurangi efektivitasnya.

Dalam bab IV ini dilakukan audit operasional aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuan dilakukannya audit operasional adalah membantu Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menganalisa dan mencari pemecahan masalah, khususnya yang menyangkut aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin. Manfaatnya adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan pelaksanaan audit operasional atas aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin pada Dinas Peternakan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas.

4.1 Evaluasi Audit Survei Pendahuluan

Pada tahap survei pendahuluan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat tentang lingkungan dinas yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi dinas, lingkungan manajemen, kebijakan, standar dan prosedur kinerja. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian, mencari informasi dan data tertulis, serta melakukan wawancara dengan pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap aktivitas yang diperiksa.

Pada tahap ini penulis berhasil mendapatkan informasi-informasi pendahuluan, antara lain:

1. Gambaran umum dan sejarah singkat Dinas Peternakan Kabupaten Ogan

2. Struktur organisasi dan tanggungjawab setiap bidang pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin.

4.2 Perencanaan Program (Pelaksanaan Langkah-langkah persiapan Pendahuluan Dalam Audit Operasional Terhadap Aktivitas Belanja Hewan Ternak Untuk Program Bantuan Sosial Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Langkah-langkah persiapan pendahuluan yang dilakukan sebelum ke tahap selanjutnya adalah :

1. Menentukan cakupan lingkup dan tujuan audit yang akan dilakukan.

Dalam hal ini cakupan dan lingkup audit hanya dibatasi pada pelaksanaan aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuan audit adalah untuk menilai keefektifitasan aktivitas tersebut.

2. Mengumpulkan data yang diperlukan, antara lain:
 - a. Memperoleh dan mempelajari kebijakan yang ditetapkan Dinas termasuk unit kerja yang terkait dalam aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin.
 - b. Melakukan observasi atas pelaksanaan aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin. Dari hal tersebut dapat dilihat apakah aktivitas belanja hewan ternak untuk program

bantuan sosial masyarakat miskin sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 649 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c. Melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan aktivitas belanja tersebut. Pada kegiatan wawancara ini didapatkan informasi-informasi berikut ini:

- a) Struktur organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Struktur organisasi pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan organisasi pegawai dan garis dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris. Masing-masing bidang memiliki tanggung jawab kepada kepala bidang dan bekerja sama dalam pencapaian tujuan.
- b) Tempat penyimpanan hewan ternak. Pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah tersedia tempat penyimpanan hewan ternak berupa kandang. Dinas Peternakan memiliki enam kandang dengan lokasi yang berbeda-beda di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan lokasi yang tidak terkonsentrasi yang menjadikan kegiatan operasional belum sepenuhnya efektif. Lokasi yang tidak terkonsentrasi menjadikan upaya untuk mempermudah pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap hewan Ternak menjadi sulit dilakukan.

- c) Dokumen yang terkait dalam aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin terdapat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mencatat kegiatan operasional belanjanya. Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen pelaksanaan anggaran, surat permintaan pembelian, berkas kontrak, nota, dan kwitansi.

4.3 Pengkajian ulang terhadap Audit Operasional

4.3.1 Analisa Terhadap Struktur Organisasi

Dalam bagan struktur Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti yang dijelaskan pada Bab III mengenai struktur organisasi, dapat dilihat pemisahan tugas dan tanggungjawab yang jelas. Pelaksanaan aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin ditemukan pemisahan bagian yang memadai. Bidang Penyebaran dan Pengembangan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan identifikasi dan penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan.
2. Melaksanakan penataan ternak.
3. Melaksanakan urusan distribusi dan redistribusi ternak.

Seksi-seksi bidang penyebaran dan pengembangan yaitu Seksi penataan, Seksi distribusi dan redistribusi, Seksi identifikasi dan data.

4.3.2 Kebijakan Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dilaksanakan berdasarkan ketetapan yang sesuai Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 649 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Dinas Peternakan menetapkan agar aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan juga proses belanja yang dilaksanakan harus memenuhi persyaratan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4.3.3 Aktivitas Belanja hewan Ternak Untuk Program Bantuan Sosial Masyarakat Miskin

Aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kegiatan yang penting sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan pengendalian yang baik. Pencapaian efektivitas dan efisiensi dari aktivitas tidak terlepas dari penyimpangan-penyimpangan yang ada atau yang mungkin terjadi di dalam Dinas Peternakan harus dapat diatasi atau dihindarkan. Untuk mengatasi dan menghindari penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan audit operasional yang baik.

Audit operasional yang dilakukan pada aktivitas belanja hewan ternak yang berkaitan dengan efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan di dalam Dinas, termasuk pelaksanaan program kerjanya. Aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial telah dilakukan secara memadai sesuai dengan maksud, tujuan, dan kriteria pemberian bantuan sosial yang telah ditentukan oleh Dinas Peternakan. Tingkat efektivitas dalam aktivitas belanja hewan ternak untuk program sosial masyarakat miskin pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir diukur dengan membandingkan SOP Pelelangan hewan ternak dengan hasil nyata yang telah dilaksanakan. Dinas Peternakan ini telah melaksanakan prosedur dengan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan setiap peserta yaitu perusahaan yang ingin bekerjasama dalam pelelangan telah mengikuti persyaratan dan ketentuan yang ada dijelaskan pada Bab III. Peserta lelang diwajibkan mendaftar secara *online* pada *website* resmi lelang nasional yaitu <http://lpse.lkpp.go.id/eproc/> dengan mengisi formulir penyedia (lampiran I) dan formulir keikutsertaan lelang nasional (lampiran II).

Audit operasional yang dilakukan pada aktivitas belanja hewan ternak yang berkaitan dengan efisiensi adalah membandingkan antara output dengan input. Pada Dinas Peternakan ini, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya realisasi belanja hewan ternak dengan biaya anggaran belanja hewan ternak. Pada tabel 4.1 dapat dilihat perbandingan biaya realisasi belanja hewan ternak dengan biaya anggaran belanja hewan ternak sebagai berikut:

Tabel 4.1

Biaya Realisasi dan Biaya Anggaran Belanja Hewan Ternak

Tahun	Biaya Realisasi	Biaya Anggaran	Selisih
2012	Rp 3.002.246.500,00	Rp 3.026.000.000,00	Rp 353.500,00
2013	Rp 1.089.800.000,00	Rp 1.089.540.000,00	Rp260.000,00

Sumber data : Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pada tabel di atas terjadi surplus pada tahun 2012 dan 2013, yaitu sebesar Rp 353.500,00 dan Rp260.000,00. Meskipun terjadi surplus, Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat sudah dikatakan efisien karena surplus yang terjadi tidak mencapai satu persen (1%) dari selisih dibandingkan dengan biaya anggaran belanja hewan ternak.

4.3.4 Prosedur

Prosedur aktivitas belanja hewan ternak untuk program bantuan sosial masyarakat miskin pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pokok-pokok prosedur pelaksanaan siklus pembelian barang/jasa, prosedur pelaksanaan aktivitas belanja hewan ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan standar operasional prosedur (SOP) yaitu prosedur pengeluaran bibit ternak. Prosedur Pengeluaran bibit ternak terdiri dari empat belas aktivitas berdasarkan mutu baku yang terdiri dari persyaratan, waktu, dan output.

4.3.5 Akuntansi

Setiap biaya terjadi akibat belanja hewan ternak untuk program bantuan masyarakat miskin akan diteliti keabsahan dan kecocokannya dengan bukti-bukti pembayaran yang akan dilaksanakan oleh bagian penyebaran dan pengembangan. Setelah biaya yang terjadi diperiksa dan diproses oleh bagian penyebaran dan pengembangan selanjutnya akan dicatat oleh bendahara pada buku kas umum Dinas Peternakan. Pencatatannya dicontohkan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jurnal Umum Belanja Hewan Ternak

No	Tgl	No. Bukti	Uraian	Kode Rek	Penerimaan	Pegeluaran	Saldo
54	1/1/13	1779/SP2 D/2013	Pembayaran 100% Pengadaan Bantuan Bibit Ternak Sapi, Kerbau, dan Itik Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Kab. OKI TA 2013 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			xxx	xxx

Sumber data : Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir

4.4 Pelaporan Audit Operasional

Dari analisa yang telah diuraikan diatas, maka dapat disusun suatu pengembangan berupa temuan-temuan yang akan membahas permasalahan yang dihadapi, kondisi yang mnyebabkan timbulnya permasalahan, akibat yang

ditimbulkan terhadap Dinas, yang secara sistematis akan diungkapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Judul temuan (Temuan/masalah yang akan dibahas)
2. Kondisi (keadaan yang sebenarnya terjadi)
3. Kriteria (keadaan yang seharusnya terjadi)
4. Sebab (hal yang mengakibatkan hal tersebut terjadi)
5. Akibat
6. Komentar
7. Rekomendasi

Daftar temuan tersebut adalah sebagai berikut :

Temuan Pertama

Judul Temuan

Terdapat keterlambatan salah satu aktivitas dari waktu yang ditentukan.

Kondisi

Didalam prosedur pengeluaran bibit ternak terdapat empat belas aktivitas yang berdasarkan mutu baku yang terdiri dari persyaratan, waktu, dan output. Pada aktivitas proses pemberizn izin operasional oleh Seksi Pembibitan yang diajukan ke Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Ilir melalui Kepala Bidang Penyebaran dan Pengembangan untuk disetujui terdapat keterlambatan penyediaan dokumen yang seharusnya hanya 1 hari menjadi 2 hari tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kriteria

Didalam prosedur pengeluaran bibit ternak terdapat empat belas aktivitas yang berdasarkan mutu baku yang terdiri dari persyaratan, waktu, dan output. Pada aktivitas proses pemberian izin operasional oleh Seksi Pembibitan yang diajukan ke Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Ilir melalui Kepala Bidang Penyebaran dan Pengembangan untuk disetujui. Mutu baku dari aktivitas tersebut adalah dipenuhi persyaratan berupa surat keputusan pemenang dan surat perjanjian kerjasama dalam waktu 1 hari dengan outputnya berupa surat permohonan izin operasional.

Sebab

Waktu yang diberikan yaitu 1 hari tidak cukup bagi seksi pembibitan untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan pengajuan untuk surat izin operasional kepada Kepala Bidang Penyebaran dan Pengembangan.

Akibat

Keterlambatan yang dilakukan oleh seksi pembibitan mengakibatkan tidak efektifnya waktu penyelesaian aktivitas berdasarkan prosedur pengeluaran bibit ternak. Tidak efektifnya waktu pada aktivitas ini membuat aktivitas pada prosedur berikutnya harus menyelesaikan dalam waktu yang lebih cepat untuk mencegah keterlambatan pula pada prosedur selanjutnya dan pada akhirnya prosedur yang ada dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Rekomendasi

Untuk keterlambatan penyediaan salah satu dokumen oleh seksi pembibitan sebaiknya lebih memperhatikan persyaratan dan waktu yang tersedia yang

telah ditentukan dalam prosedur untuk melengkapi data yang diperlukan sehingga dapat menjadi salah satu antisipasi suatu pertanggungjawaban untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sehingga prosedur yang ada dapat dilakukan secara efektif.

Temuan Kedua

Judul Temuan

Lokasi kandang yang tidak terkonsentrasi.

Kondisi

Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki tempat penyimpanan hewan Ternak berupa kandang yang jumlahnya ada enam kandang terdapat di lokasi yang berbeda-beda di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kriteria

Pengembangan bibit hewan ternak seharusnya diarahkan pada suatu kawasan, baik kawasan khusus maupun kawasan yang terintegrasi dengan hal yang terkait hewan ternak lainnya serta terkonsentrasi pada suatu wilayah untuk mempermudah pembinaan, bimbingan, dan pengawasan hewan Ternak yang baik.

Sebab

Karena pengelolaan hewan ternak masih berbasis pada peternakan rakyat yang berciri skala usaha kecil, manajemen yang sederhana, pemanfaatan teknologi yang seadanya dan lokasi yang tidak terkonsentrasi.

Akibat

Lokasi kandang yang tidak terkonsentrasi menyebabkan belum efektifnya upaya Dinas Peternakan untuk mempermudah pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dalam usaha menghasilkan hewan Ternak dengan kualitas yang baik.

Rekomendasi

Sebaiknya Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengarahkan lokasi kandang dari masing-masing lokasi yang berbeda ke suatu kawasan khusus atau ke kawasan yang saling terintegrasi yang terkonsentrasi pada suatu wilayah sehingga Aktivitas belanja hewan ternak dalam upaya mempermudah pembinaan, bimbingan, dan tentunya pengawasan hewan ternak dapat dijalankan secara lebih efektif.

Temuan Ketiga

Judul Temuan

Terdapat penyajian informasi yang kurang lengkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kondisi

Catatan Atas Laporan Keuangan yang ada hanya menampilkan total biaya atas realisasi dan anggaran yang dikeluarkan untuk aktivitas belanja hewan ternak tetapi kurang dilengkapi dengan kuantitas pembelian hewan ternak atas biaya yang telah dikeluarkan pada tahun anggaran.

Kriteria

Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan berdasarkan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Peternakan meliputi pendahuluan, keijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, sehingga dapat dihasilkan suatu rincian dan penjelasan dari masing-masing pos pelaporan keuangan Dinas Peternakan

Sebab

Karena pada penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Peternakan lebih utama dan spesifik dalam memberikan total rincian-rincian dana yang digunakan dalam aktivitas belanja

Akibat

Penyajian informasi dan data yang kurang lengkap, menampilkan anggaran dan realisasi tanpa dilengkapi dengan kuantitas hewan ternak yang dibeli. Penyajian laporan keuangan yang ada menjadi kurang efektif bagi pembaca laporan keuangan karena data yang ada kurang memberikan penjelasan lebih tentang belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat mengenai kuantitas hewan ternak yang dibeli untuk program bantuan sosial masyarakat miskin.

Rekomendasi

Sebaiknya penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan dengan memberikan penjelasan-

penjelasan pada setiap aktivitas yang terjadi sehingga pembaca laporan keuangan akan mendapatkan informasi yang lebih efektif.

4.5 Tindak Lanjut

Sebagaimana tahap akhir dari audit operasioal, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Penulis tidak mempunyai wewenang untuk mengharuskan Dinas melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Adapun tindak lanjutnya terdiri dari :

1. Untuk keterlambatan penyediaan salah satu dokumen oleh seksi pembibitan sebaiknya lebih memperhatikan persyaratan dan waktu yang tersedia yang telah ditentukan dalam prosedur untuk melengkapi data yang diperlukan sehingga dapat menjadi salah satu antisipasi suatu pertanggungjawaban untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sehingga prosedur yang ada dapat dilakukan secara efektif.
2. Sebaiknya Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengarahkan lokasi kandang dari masing-masing lokasi yang berbeda ke suatu kawasan khusus atau ke kawasan yang saling terintegrasi yang terkonsentrasi pada suatu wilayah sehingga Aktivitas belanja hewan ternak dalam upaya mempermudah pembinaan, bimbingan, dan tentunya pengawasan hewan ternak dapat dijalankan secara lebih efektif.
3. Sebaiknya penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan dengan memberikan

penjelasan-penjelasan pada setiap Aktivitas yang terjadi sehingga pembaca laporan keuangan akan mendapatkan informasi yang lebih efektif.